

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Berdasarkan temuan analisis empiris yang telah diuraikan, studi ini bertujuan menguji pengaruh pajak daerah, zakat, infak, serta sedekah (ZIS), dan pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia pada rentang 2019–2024. Dari pengolahan data dan pengujian yang dilakukan, diperoleh kesimpulan berikut sesuai hasil empiris:

1. Variabel pajak daerah tidak menunjukkan pengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia periode 2019–2024. Oleh karena itu, hipotesis pengaruh pajak terhadap kemiskinan ditolak. Fakta ini mencerminkan bahwa fluktuasi realisasi pajak belum menghasilkan efek nyata pada penurunan atau kenaikan angka kemiskinan selama masa observasi.
2. Penyaluran dana ZIS juga terbukti tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia pada periode 2019–2024. Dengan demikian, hipotesis pengaruh signifikan dana ZIS terhadap kemiskinan tidak terverifikasi. Hal tersebut menggambarkan bahwa variasi distribusi ZIS belum memberikan kontribusi substansial terhadap dinamika kemiskinan dalam rentang waktu tersebut.
3. Secara parsial, pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia periode 2019–2024. Karenanya, hipotesis pengaruh signifikan pertumbuhan ekonomi diterima. Temuan ini menegaskan bahwa percepatan pertumbuhan ekonomi telah direspons dengan penurunan kemiskinan yang terukur secara statistik.
4. Meskipun demikian, secara simultan, variabel pajak daerah, penyaluran dana ZIS, dan pertumbuhan ekonomi secara kolektif

berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia periode 2019–2024. Ini menandakan bahwa, walaupun parsialnya tidak selalu dominan, interaksi ketiga variabel tersebut secara bersama-sama berkontribusi dalam menjelaskan variabilitas kemiskinan.

## B. IMPLIKASI

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diperoleh, maka implikasi yang dapat dikemukakan adalah sebagai berikut:

1. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pajak daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Hal ini mengindikasikan bahwa peningkatan penerimaan pajak belum tentu langsung berdampak pada penurunan kemiskinan apabila tidak diiringi dengan kebijakan belanja yang tepat sasaran. Dengan demikian, efektivitas pajak sebagai instrumen redistribusi sangat bergantung pada bagaimana pemerintah daerah mengalokasikan anggaran untuk program-program yang menyentuh masyarakat miskin.
2. Tidak signifikannya pengaruh ZIS terhadap tingkat kemiskinan menunjukkan bahwa potensi dana sosial keagamaan tersebut belum sepenuhnya dimanfaatkan secara maksimal dalam skala makro. Hal ini memberikan gambaran bahwa pengelolaan, penghimpunan, serta pola distribusi ZIS masih perlu diperkuat agar dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat lebih terasa dan berkelanjutan.
3. Pertumbuhan ekonomi terbukti berpengaruh signifikan dan negatif terhadap tingkat kemiskinan. Temuan ini menegaskan bahwa peningkatan aktivitas ekonomi yang stabil dan berkelanjutan masih menjadi faktor penting dalam menekan angka kemiskinan. Oleh karena itu, kebijakan pembangunan daerah perlu diarahkan pada pertumbuhan yang inklusif dan mampu membuka kesempatan kerja yang luas.
4. Secara simultan, pajak daerah, ZIS, dan pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Hal ini menunjukkan

bahwa penanggulangan kemiskinan tidak dapat dilakukan secara parsial, melainkan memerlukan sinergi antara kebijakan fiskal, instrumen sosial, dan stabilitas ekonomi secara menyeluruh.

### **C. REKOMENDASI**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, maka beberapa rekomendasi yang dapat penulis sampaikan adalah sebagai berikut:

#### **1. Bagi Pemerintah**

Pemerintah diharapkan dapat meningkatkan efektivitas kebijakan fiskal, khususnya dalam pengelolaan dan pemanfaatan penerimaan pajak agar lebih optimal dalam mendukung program pengentasan kemiskinan. Meskipun dalam penelitian ini pajak secara parsial belum menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kemiskinan, namun optimalisasi belanja negara yang diarahkan pada sektor pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat berpendapatan rendah diharapkan mampu meningkatkan dampaknya terhadap penurunan kemiskinan.

Selain itu, pemerintah perlu mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan merata. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi perlu diiringi dengan pemerataan distribusi pendapatan dan penciptaan lapangan kerja yang luas, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah, sehingga manfaat pertumbuhan dapat dirasakan secara menyeluruh dan berkontribusi nyata terhadap pengurangan kemiskinan.

#### **2. Bagi BAZNAS dan Lembaga Amil Zakat**

Bagi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan lembaga amil zakat lainnya, disarankan untuk terus meningkatkan efektivitas penghimpunan dan pendistribusian dana zakat agar lebih produktif dan berkelanjutan. Program pendistribusian zakat tidak hanya bersifat konsumtif, tetapi juga diarahkan pada program pemberdayaan ekonomi, seperti bantuan modal usaha, pelatihan keterampilan, dan pendampingan usaha bagi mustahik.

Selain itu, peningkatan transparansi, akuntabilitas, serta pemanfaatan

teknologi digital dalam sistem pengelolaan zakat diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat dan memperluas partisipasi muzaki, sehingga potensi zakat dapat dimaksimalkan dalam upaya pengentasan kemiskinan.

### **3. Bagi Peneliti Selanjutnya**

Penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas cakupan variabel penelitian dengan menambahkan faktor-faktor lain yang memengaruhi kemiskinan, baik faktor ekonomi maupun non-ekonomi, seperti tingkat pendidikan, kesehatan, ketimpangan pendapatan, kualitas tata kelola pemerintahan, dan stabilitas ekonomi. Selain itu, peneliti selanjutnya juga dapat menggunakan periode penelitian yang lebih panjang, pendekatan metode yang berbeda, atau mengombinasikan analisis kuantitatif dan kualitatif agar mampu memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai faktor-faktor yang memengaruhi tingkat kemiskinan.